

Buletin

ISSN 0854-9923

taber
ARSIP

FKP2T

FORUM KERJASAMA PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

TH. 1 NO. 2

JUNI - NOPEMBER 1995



MENATAP WAJAH PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI KITA

Lasa Hs.

Pustakawan UPT Perpustakaan UGM

Sebagaimana disadari bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan bangsa. Baik itu pendidikan formal, informal maupun non formal. Melalui pendidikan, mereka memperoleh ilmu, ketrampilan maupun informasi yang merangsang kreativitas mereka untuk menuju ke kondisi yang lebih dinamis.

Pendidikan di perguruan tinggi memiliki ciri khas apabila dibandingkan dengan pola pendidikan lain yakni mengemban tugas Tridharma perguruan tinggi. Kewajiban pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat merupakan kewajiban masyarakat perguruan tinggi secara keseluruhan. Oleh karena itu jajaran perguruan tinggi terdapat bagian, lembaga penelitian, pengabdian pada masyarakat maupun unit pelaksana teknis yang berfungsi sebagai pelaksana dharma tersebut.

Kedudukan perpustakaan di perguruan tinggi sebagai unit pelaksana teknis merupakan fungsi strategis sebagai penunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lebih dari itu, perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai elemen yang tak terpisahkan dengan proses pendidikan di perguruan tinggi itu. Ada yang berpendapat bahwa universitas yang sejati adalah perpustakaan dan ini berarti perpustakaan bukan sekedar jantung maupun paru-paru pajangan bagi suatu perpustakaan perguruan tinggi.

Dalam perkembangannya, perpustakaan perguruan tinggi lebih maju dan lebih mapan apabila dibanding dengan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum. Kondisi semacam ini kiranya dapat dipahami lantaran adanya tuntutan kebutuhan informasi ilmiah dari sivitas akademika yang masyarakat pemakainya tidak berlapis-lapis seperti pada pemakai perpustakaan umum. Rata-rata para pengelola perpustakaan perguruan tinggi telah memperoleh pendidikan perpustakaan berupa; kursus, magang, pendidikan diploma, S1, S2 maupun S3 sehingga perpustakaan perguruan tinggi lebih cepat berkembang. Perkembangan ini merupakan tuntutan tersendiri seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal itu menyebabkan kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat.

Menurut survei dan kajian perpustakaan perguruan tinggi; Kajian Pelayanan di 7 (tujuh) Propinsi oleh Perpustakaan Nasional tahun 1992 disebutkan bahwa menurut data tahun 1990/1991 di seluruh Indonesia terdapat 329 perguruan tinggi dengan jumlah staf perpustakaan 2.418 orang dan koleksi 5.040.048 eks. Jumlah itu ternyata didominasi oleh propinsi-propinsi di P.Jawa yang memiliki banyak perguruan tinggi seperti; DIY, Jawa Timur, Jawa barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang mencapai 199 perguruan tinggi (60,48 %).

Sebagaimana diketahui bahwa perguruan tinggi merupakan pusat kegiatan pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan (*centre of excelent*) yang perlu ditunjang dengan sumber informasi yang berkualitas. Kondisi ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas keilmuan sivitas akademika dan mempercepat pengembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK dalam suatu masyarakat sangat menentukan arah peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Oleh karena itu eksistensi perpustakaan perguruan tinggi sangat mempengaruhi transformasi ilmu pengetahuan dalam lingkup lembaga itu sendiri maupun di luar kampus.

Namun demikian, kondisi perpustakaan perguruan tinggi sampai kini masih mengalami beberapa kelemahan. Di samping itu juga telah terlihat adanya usaha pembenahan seiring dengan teknologi informasi dan mendesaknya kebutuhan informasi ilmiah. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

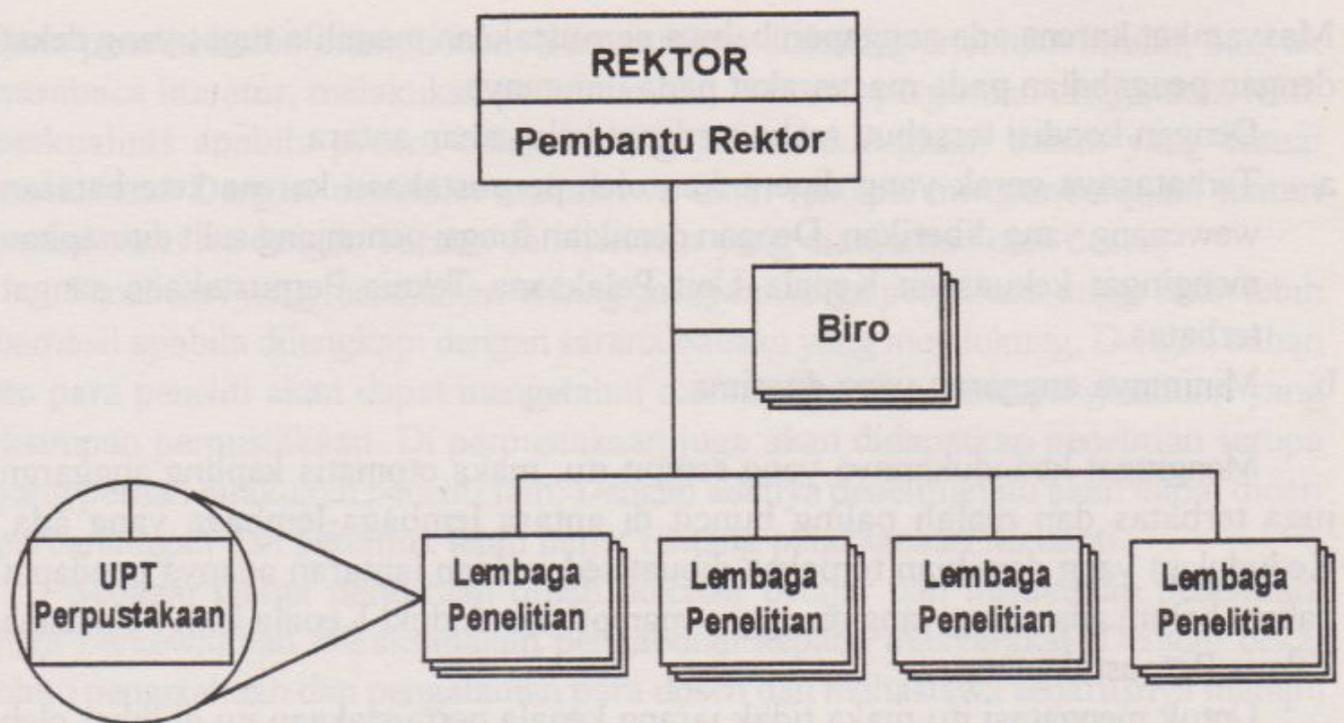
1. Kurang mantapnya status dan fungsinya dalam struktur organisasi perguruan tinggi.

Meskipun dalam berbagai kesempatan terutama kesempatan resmi yang berkaitan dengan pendidikan telah banyak pengakuan (tertulis, pidato atau dalam seminar) tentang pentingnya perpustakaan bagi suatu perguruan tinggi. Namun realitanya belum tentu demikian. Bahkan statusnya di satu perguruan tinggi berbeda dengan ada yang telah menganut sentralisasi penuh, ada yang semi sentralisasi dan ada yang desentralisasi. Di tingkat pusat (universitas, institut, sekolah tinggi) memiliki perpustakaan, tetapi di tiap fakultas bahkan jurusan atau seksi juga memiliki perpustakaan mini, sedang kedudukan perpustakaan di PTS juga sangat bervariasi, misalnya ada yang di bawah Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II malah ada yang dibawah Biro Administrasi & Keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pasal 34, mengenai perpustakaan disebutkan sebagai berikut:

- (1) Unsur penunjang pada perguruan tinggi merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berada di luar fakultas, jurusan dan laboratorium.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas perpustakaan pusat komputer, laboratorium, kebun percobaan, bengkel, teknologi pengajaran dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis yang berfungsi sebagai penunjang kelengkapan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang ketiganya merupakan tridharma perguruan tinggi. Kedudukan UPT berada di luar lingkup fakultas dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara implisit keberadaan perpustakaan fakultas, bagian maupun jurusan tidak disebut dalam peraturan itu. Oleh karena itu hidup dan matinya perpustakaan fakultas tergantung pada pimpinan masing-masing. Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi seharusnya adalah sebagai berikut :



(Sumber : Perpustakaan Perguruan Tinggi; Buku Pedoman 1994)

Dalam gambar tersebut dapat dipahami bahwa antara Rektor dan Pembantu Rektor merupakan satu kesatuan sehingga dalam hal-hal tertentu Rektor dapat saja mendelegasikan wewenangnya kepada Pembantu Rektor yang bersangkutan. Untuk itu dalam kegiatan sehari-hari Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dapat berhubungan kepada Pembantu Rektor I (bidang akademis).

Kecuali itu, dapat diketahui bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan adalah sama dan sejajar dengan Kepala-Kepala Unit Pelaksana Teknis yang lain seperti Kepala Pusat Komputer, Laboratorium, Kebun Percobaan, Bengkel, Pusat Penelitian dan Dekan. Dengan demikian apabila para Dekan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya itu menduduki eselon II, maka wajar apabila Kepala Unit Pelaksana teknis Perpustakaan juga menduduki eselon II.

Dengan berbagai alasan dan argumentasi, kedudukan itu sangat bervariasi untuk perguruan tinggi di negeri ini. Maka ada yang menduduki eselon III, ada yang di bawah Lembaga Penelitian, bahkan di bawah Lembaga Pengabdian

Masyarakat karena ada anggapan bahwa perpustakaan memiliki tugas yang dekat dengan pengabdian pada masyarakat pada umumnya.

Dengan kondisi tersebut, maka terdapat kelemahan antara :

- a. Terbatasnya gerak yang diperankan oleh perpustakaan karena keterbatasan wewenang yang diberikan. Dengan demikian fungsi penunjang sulit diterapkan mengingat kekuasaan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sangat terbatas.
- b. Minimnya anggaran yang diterima

Mengingat kedudukannya yang sempit itu, maka otomatis kapling anggaran juga terbatas dan malah paling buncit di antara lembaga-lembaga yang ada. Kedudukan yang demikian terpaksa dibuat sedemikian lantaran adanya pendapat bahwa belum ada orang yang dianggap mampu menduduki Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.

Untuk mengatasi itu maka tidak jarang kepala perpustakaan itu di jabat oleh dosen dan bukan pustakawan. Hal itu tidak saja di PTS bahkan di PTN pun banyak terjadi. Di samping itu juga terdapat suatu anggapan bahwa tugas perpustakaan sama dengan tugas tata usaha sehingga cukup diberikan eselon III sama dengan kepala bagian atau cukup dijabat lulusan SLTA ditambah kursus perpustakaan sekian hari.

Apabila kondisi seperti itu tidak diperhatikan dan tidak disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang ada, maka perpustakaan masih sulit memainkan peran yang sesuai dengan tuntutan jaman. Sebab status akan mempengaruhi gerak dan langkah serta anggaran.

2. Lemahnya Koleksi (Kualitas maupun kuantitas).

Buku-buku yang ada dimiliki perpustakaan perguruan tinggi sebagian besar buku lama-lama. Itupun didominasi buku teks dan jarang dimiliki buku-buku keilmuan yang berfungsi sebagai pendukung penelitian/*Schorlarly book*.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu misi perguruan tinggi adalah membentuk masyarakat ilmiah sebagai "*man of analysis*" maka harus mampu dan mau berpikir ilmiah. Untuk itu segenap sivitas akademika (dosen dan mahasiswa)

serta peneliti harus mampu menyelenggarakan diskusi, pertemuan ilmiah, banyak membaca literatur, melakukan penelitian dll. Lulusan perguruan tinggi akan lebih berkualitas apabila proses belajar mengajar itu dilengkapi bahan yang sesuai kurikulum. Dengan demikian mahasiswa akan mampu mengembangkan materi perkuliahan itu dengan bacaan dan literatur yang dianjurkan oleh dosen.

Penelitian yang merupakan bidang garapan warga perguruan tinggi akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan sarana bacaan yang mendukung. Dengan bahan itu para peneliti akan dapat mengetahui dan mempelajari ilmu pengetahuan yang disimpan perpustakaan. Di perpustakaan juga akan didapatkan penelitian serupa yang pernah dilakukan peneliti lain. Dengan adanya penelitian itu akan dapat dicari perbandingan dan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan itu nanti.

Sebagai warga perguruan tinggi, kecuali belajar dan melakukan penelitian, juga berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman para dosen dan mahasiswa seharusnya mampu mengembangkan pemikiran mereka kepada masyarakat. Sumbangan pemikiran itu akan lebih berkualitas apabila ditunjang dengan literatur yang berbobot dan mengandung nilai kebaruan (*uptodateness*).

Penyediaan buku teks misalnya masih terdapat kecenderungan untuk menyimpan jumlah yang banyak untuk setiap judul buku. Bahkan ada yang satu judul buku dari ratusan eksemplar ini dan memakan tempat.

Di negara maju seseorang mahasiswa tidak menggantungkan kebutuhan buku teks untuk mata kuliah tertentu pada perpustakaan. Buku teks dapat mereka beli di toko-toko buku yang dikoordinir oleh mahasiswa. Pada setiap awal perkuliahan di awal semester, seorang dosen telah memberitahukan buku-buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan itu pasti sudah bisa dibeli di toko buku. Maka tak heran kalau perpustakaan perguruan tinggi kita baru bisa menjadi pengedar buku teks. Sedangkan keterbatasan koleksi sangat mempengaruhi minat seseorang untuk datang ke perpustakaan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survei dan kajian perpustakaan perguruan tinggi tahun 1991/1992. Dalam survei itu dinyatakan bahwa 36,74 % responden berpendapat bahwa koleksi merupakan faktor penghambat utama dalam pelayanan. Kemudian faktor penghambat lain yang menonjol adalah sarana dan prasarana (22,74%) dan sekitar 20 % faktor penghambat adalah unsur lain.

Pengadaan buku sangat dipengaruhi oleh penyediaan anggaran/dana. Sedangkan dana pembelian buku di Indonesia rata-rata masih rendah apabila dibanding dengan anggaran negara lain. Data pada tahun 1979 menyatakan bahwa dana untuk perguruan tinggi katagori A rata-rata US \$ 2,7. Sedangkan pembelian buku di negara lain rata-rata US \$ 5,00 per mahasiswa/tahun. Sehubungan dengan anggaran ini, Dra. Murianti, MLS Kepala UPT Perpustakaan UGM (1992) menyatakan bahwa di Indonesia kebanyakan perpustakaan perguruan tinggi mendapat dana 25 (dua puluh lima) juta rupiah sampai 300 (tiga ratus) juta rupiah/tahun untuk pengadaan koleksi. Hal ini kurang menguntungkan bagi perpustakaan karena tidak diperhitungkan adanya kenaikan harga terbitan berkala yang dilanggan dari luar negeri yang naik sekitar 10-15 /tahun.

Kecuali itu soal pembelian buku maupun melanggan majalah sering dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk tanpa pemberitahuan kepada perpustakaan, sehingga sering terjadi duplikasi pustaka. Disamping itu karena adanya kenaikan harga langganan majalah, maka jumlah judul majalah yang dilanggan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Di perguruan tinggi negeri kadang terdapat beberapa peraturan yang aneh, misalnya untuk melanggan majalah luar negeri tidak dibenarkan membayar majalah lebih dulu sebelum barangnya diterima. Hal ini merupakan sesuatu yang menyalahi kebiasaan internasional.

(B E R S A M B U N G)

**BELAJAR AKAN MENAJAMKAN PIKIRAN
SEKALIGUS MENUMPULKAN MULUT TAJAM**